



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisa Parameter Domestik dan Internasional dalam  
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Perancis terhadap  
Suriah pasca *Paris Attack***

Skripsi

Oleh

Rahel Eterlita

2013330188

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisa Parameter Domestik dan Internasional dalam  
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Perancis terhadap  
Suriah pasca *Paris Attack***

Skripsi

Oleh

Rahel Eterlita

2013330188

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Rahel Eterlita  
Nomor Pokok : 2013330188  
Judul : Analisa Parameter Domestik dan Internasional dalam  
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Perancis terhadap  
Suriah Pasca *Paris Attack*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 9 Mei 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.d.:

**Sekretaris**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

**Anggota**

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahel Eterlita

NPM : 2013330188

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Analisa Parameter Domestik dan Internasional dalam Perubahan Kebijakan Perancis terhadap Suriah pasca *Paris Attack*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Mei 2017



Rahel Eterlita

## ABSTRAK

Nama : Rahel Eterlita  
NPM : 2013330188  
Judul : Analisa Parameter Domestik dan Internasional dalam  
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Perancis terhadap Suriah  
pasca *Paris Attack*

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebijakan Perancis di Suriah yang mengalami beberapa perubahan setelah serangan teroris yang dialaminya pada November 2015. Sebagai negara demokrasi dan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta norma-norma internasional, Perancis sangat vokal dalam memberikan kritik terhadap pemerintah Suriah. Ia menjadi sangat tegas kepada Bashar Al-Assad di awal terjadinya krisis Suriah. Namun setelah serangan November 2015, ketegasan Perancis terhadap Assad semakin menurun yang ditandai juga dengan fokus kebijakan yang beralih ke penanggulangan ISIS. Perubahan lain terlihat pada pola kerjasama Perancis yaitu hubungannya yang cenderung menjadi dekat dengan Rusia melalui operasi militer dan pertukaran intelijen bersama. Untuk menjelaskan permasalahan penulis menggunakan parameter domestik dan internasional kebijakan luar negeri dari Christopher Hill. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan analisa data sekunder. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa parameter yang paling mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Perancis terhadap Suriah adalah domestik.

Kata Kunci: Perancis, Suriah, kebijakan luar negeri, parameter domestik, parameter internasional

## ABSTRACT

Name : Rahel Eterlita  
Student Number : 2013330188  
Title : Analysis of Domestic and International Parameters in  
The changing Foreign policy of France toward Syria  
after Paris Attack

---

This research aims to explain more about France's policy in Syria which experienced several changes due to the November 2015 terrorist attacks in Paris. As a democratic country and a highly supportive state of human rights and international norms, France is very active in criticizing the Syrian government. France shows a very firm position regarding Bashar Al-Assad in the early Syrian crisis. However after the November 2015 terrorist attacks, France showed a slightly softer stance towards Assad which can be seen from its change in priority to ISIS. Another change is evident in its international cooperation which is becoming closer to Russia by conducting joint military operation and sharing intelligence. To explain the research problem, the writer uses the theory of Christopher Hill about domestic and international parameters of foreign policy. The data used are qualitative data with secondary analysis data as the technique. Based on the theory and assessments, the writer finds that the dominant parameter that shapes France's foreign policy in Syria is the domestic parameter.

Key Words: France, Syria, foreign policy, domestic parameter, international parameter

## ABSTRACT

Nom : Rahel Eterlita  
Numéro d'étudiant : 2013330188  
Titre : Analyses du Paramètre Domestique et International  
dans Les changements de politique étrangère de la  
France en Syrie après les attentats du Paris

---

Ces recherches a visé pour explique la politique de la France en Syrie qui avait quelque changements après les attaques du Novembre 2015 à Paris. Comme un pays démocratique, La France donnait les support pour les droits de l'homme et des normes international. Cette position est apparu dans les pression très actif sur le régime Syrien. La France a démontré un position ferme pour Bachar Al-Assad au début de la crises Syrienne. Après les attaques du Novembre 2015, la France a montré une attitude plus douce envers lui qui été vu de son changement de priorite à l'état islamique. Les autres changement est la coopération plus étroite avec la Russe qui avant les attaques, cette coopération n'existe pas. Pour l'expliquer, la théorie utilisée est les paramètre domestique et international de Christopher Hill. Ensuite, les datas utilisé est data qualitative avec secondaire data analysis pour le technique. Basé sur les évaluation, il est constanté que le dominant paramètre dans l'elaboration du politique étrangère de la France est le paramètre domestique.

Mot Clés: France, Syrie, la politique étrangère, paramètre domestique, paramètre international

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya haturkan ke hadirat Tuhan yang maha esa karena atas rahmat dan penyertaannya sajalah skripsi ini dapat selesai. Skripsi yang mengambil judul analisa parameter domestik dan internasional dalam perubahan kebijakan luar negeri Perancis terhadap Suriah pasca Paris Attack membahas mengenai kebijakan luar negeri Perancis yang dipengaruhi oleh parameter domestik dan internasional. Dengan dibuatnya skripsi ini penulis berharap dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai indikator apa saja yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Perancis pasca Paris Attack. Selain itu diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melancarkan proses penulisan skripsi ini;

- Tuhan Yesus, untuk nafas kehidupan, untuk keluarga dan sahabat yang diberikan, terlebih untuk hikmat yang diberikan dalam menulis skripsi ini.
- Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Mangadar Situmorang, Ph.d, beserta jajarannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, beserta jajarannya, serta ketua program studi Hubungan Internasional Sylvia Yazid, Ph.d.
- Dosen pembimbing penulis, Mas Idil Syawfi, yang selalu sabar dalam memberikan arahan bagi penulis yang sama sekali tidak dapat berfikir kritis dan kekurangan ide/kreatifitas. Tanpa bimbingan mas skripsi ini tidak akan tertulis dengan baik. Terima kasih banyak mas :)
- Para dosen penguji, Mas Pur, Mas Adri dan Mas Idil, terima kasih untuk masukan-masukan yang diberikan yang membuat penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Terima kasih mas Pur untuk masukan konsistensi penggunaan kata serta metode dan mas Adri untuk

masuk mengenai bukti keterlibatan ISIS dalam serangan Paris. Serta untuk mas Idil yang sudah mencatat poin-poin revisi yang diberikan dalam sidang.

- Keluarga tercinta, Mama, Papa, Benita dan Bogie! Terima kasih sudah mendukung penulis dan selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk Papa yang selalu memberikan *positive vibes* bahwa semuanya dapat berjalan lancar dengan sedikit gurauan mengenai “sarjono”. Untuk Benita yang selalu mengatakan “Kakak bisa ji besok! (sebuah ungkapan dalam logat Makassar) yang berhasil menambah rasa percaya diri penulis. Bogie yang selalu berhasil membuat penulis tertawa dan terhibur. Untuk Mama yang sudah memeriksa seluruh halaman skripsi apakah ada typo atau kalimat-kalimat yang tidak baku serta mengantar penulis ke kampus di hari sidang dan menunggu hingga penulis selesai sidang dan yang selalu mendoakan penulis. Terima kasih, Ma, Pa, Ben!
- Sahabat-sahabat penulis, Maria, Dian dan Christy. Terima kasih Dian sudah menemani penulis di hari sidang mulai dari menunggu dosen, membawakan roti yang sangat enak serta tiga bunga warna oranye. Terima kasih Maria sudah membantu penulis menyiapkan presentasi sehari sebelum sidang serta membantu mengecek argument yang dibangun penulis. Terima kasih Christy untuk semangat yang diberikan bagi penulis dan surprise yang sangat mengejutkan yang diberikan ketika penulis berulang tahun.
- Pacar terkasih, Ka Juang, terima kasih untuk motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat percaya diri dalam menyelesaikan skripsi dan menghadapi sidang serta terima kasih untuk pengalaman hidup yang dibagikan sehingga penulis dapat selalu mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam hidup penulis.

- Kakak PA, Ka Elisa, terima kasih untuk doa dan diskusi Alkitab yang sering dilakukan dan berhasil membuat penulis semakin rajin membaca Alkitab.
- Teman-teman HI, Jaqualine, Patty, Yodi, Yuli, Eben, Ferry, Cintia, Agnes, Eliana, Elita, Adel, Ira, Tika, Hanna, dll. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama berkuliah di HI Unpar dan juga untuk kehadirannya ketika penulis selesai sidang.
- Guru piano terkasih, Ka Angie, yang juga ikut memberikan dukungan dalam bentuk doa, semangat, dan lagu-lagu bagi penulis.
- PSM Unpar. Terima kasih untuk pengalaman bernyanyi bersama selama kurang lebih dua tahun dan konser-konser yang berhasil dijalani dengan baik. Pengalaman bermusik bersama PSM menambah pengetahuan penulis tentang “support” dan “nguap” yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan suara maksimal. Sukses selalu untuk PSM Unpar.
- Pihak-pihak lain yang juga ikut membantu penulis namun tidak sempat dituliskan dalam ucapan terima kasih ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, 18 Mei 2017

Rahel Eterlita

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL/DIAGRAM.....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.2.1. Pembatasan Masalah .....	8
1.2.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Kajian Literatur .....	9
1.5. Kerangka Pemikiran .....	12
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	19
1.6.1. Metode Penelitian.....	19
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II.....	22
PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI PERANCIS TERHADAP SURIAH.....	22
2.1. Serangan Paris .....	22
2.2. Prioritas Kebijakan luar negeri Perancis terhadap Suriah: Assad atau ISIS .....	25
2.3. Responsibility to Protect Vs National Security .....	33
2.4. Pola Perubahan Kerja Sama Internasional Perancis.....	38

2.5. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Perancis.....	43
BAB III.....	45
PARAMETER YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI PERANCIS DI SURIAH.....	45
3.1. Parameter Domestik Kebijakan Luar Negeri .....	45
3.1.1. Opini Publik .....	45
3.1.2. Parlemen.....	53
3.1.3. Presiden.....	58
3.1.4. Peran Media Massa .....	62
3.2. Parameter Internasional Kebijakan luar negeri Perancis terhadap Suriah .....	65
3.2.1. Politik Geografi.....	66
3.2.2. Interdependensi Politik.....	70
3.2.2.1. Peran Uni Eropa.....	70
3.2.2.2. NATO dan krisis Suriah .....	77
3.3. Parameter Domestik dan Internasional: Mana yang Lebih Dominan?82	
BAB IV .....	84
KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
4.1. Kesimpulan.....	84
4.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.5 : Parameter kebijakan luar negeri .....	19
Gambar 2.1 : Lokasi serangan Paris November 2015 .....	23

## **DAFTAR TABEL/DIAGRAM**

Tabel 2.1 : Opini masyarakat Perancis tentang intervensi ke Suriah 2013 .....	30
Tabel 2.2 : Perubahan kebijakan luar negeri Perancis .....	43
Tabel 3.1 : Opini publik dalam intervensi ke Suriah tahun 2013.....	48
Tabel 3.2 : Sentimen masyarakat Perancis.....	50
Tabel 3.3 : Opini masyarakat dengan afiliasi tertentu.....	51
Tabel 3.4 : Intervensi ke Suriah tahun 2015 .....	52
Tabel 3.5 : Posisi parlemen terhadap serangan Paris 2015 .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perancis merupakan negara yang pro terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Ia mendukung hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam nilai-nilai dan konstitusi negara Perancis. Hak asasi manusia juga yang menjadi landasan bagi pelaksanaan demokrasi di Perancis serta menjadi hal yang utama dalam hubungannya dengan negara lain dan dalam organisasi internasional.<sup>1</sup> Pelaksanaan dukungan terhadap demokrasi ini salah satunya dapat dilihat dari hubungannya dengan negara-negara di Timur Tengah.

Sebagai negara yang mempunyai banyak koloni, Perancis selalu berusaha menjaga hubungan baik antar negara-negara bekas koloninya. Karena Suriah merupakan bekas koloni Perancis, ia pun menjaga hubungan baik dengan Suriah. Namun demikian hubungan baik antar Perancis dan Suriah mulai menurun sejak pemerintah Suriah melakukan tindakan-tindakan yang represif terhadap masyarakat Suriah. Pada tahun 2011, ketika Arab Spring pertama kali terjadi di Tunisia, negara-negara barat, termasuk Perancis ikut mendukung demonstrasi massa tersebut.<sup>2</sup> Dukungan negara-negara barat tersebut terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka yang menentang rezim represif di timur tengah. Di Suriah,

---

<sup>1</sup> "Human Rights: A Priority for France's Foreign Policy", *France Diplomatie*, <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/> (diakses pada 19 April 2017)

<sup>2</sup> Lihat Oded Eran, "The West Responds to the Arab Spring", *Strategic Assessment*, Vol.14,2 (2011), 16

Perancis sangat menentang rezim Bashar Al-Assad karena penyerangan yang dilakukannya terhadap masyarakat Suriah.

Ketegasan Perancis terhadap Assad ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Hollande. Francois Hollande terpilih menjadi presiden Perancis pada tahun 2012 dan menggantikan pendahulunya, Nicolas Sarkozy. Sejak awal pemerintahan presiden Hollande, ia mengakui kelompok oposisi Suriah *Syrian National Council (SNC)*<sup>3</sup> sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat Suriah yang resmi. Selain itu Francois Hollande juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah dengan menarik duta besar Perancis untuk Suriah. Ketegasan Hollande lainnya juga terlihat ketika ia menanggapi krisis senjata kimia di Suriah yaitu dengan mendukung intervensi militer di Suriah bersama Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Tetapi karena dua negara lainnya kemudian memutuskan untuk membatalkan intervensi, Perancis juga tidak jadi mengambil tindakan intervensi tersebut. Namun demikian, Perancis tetap berusaha meyakinkan masyarakatnya akan perlunya melakukan intervensi terhadap Suriah dengan mengeluarkan dokumen resmi mengenai penggunaan senjata oleh Assad.<sup>4</sup>

Niatan untuk melakukan intervensi ini juga menunjukkan bahwa Perancis merupakan negara yang sangat peduli terhadap hal kemanusiaan. Ia menjunjung

---

<sup>3</sup> Lihat Stefan Talmon, "Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People", *Chinese Journal of International Law*, (2013), 220

<sup>4</sup> French Diplomatie, "Synthesis of Declassified National Intelligence on the Syrian Chemical Program", *French ministry of foreign affairs*, [http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Syrie\\_Synthese\\_nationale\\_de\\_renseignement\\_declassifie\\_le\\_02\\_09\\_2013\\_cle01b7e8.pdf](http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Syrie_Synthese_nationale_de_renseignement_declassifie_le_02_09_2013_cle01b7e8.pdf) (diakses pada 28 April 2017)

tinggi hak asasi manusia dimana seluruh masyarakat memiliki hak untuk dapat hidup dengan layak. Hal ini ditunjukkan melalui dukungannya terhadap norma-norma internasional salah satunya adalah *Responsibility to protect* (r2p). Perancis ikut melindungi masyarakat sipil di Suriah dengan menerima para pengungsi korban perang sipil di Suriah dan termasuk negara yang aktif mendorong negara-negara Uni Eropa lainnya untuk juga menerima para pencari suaka di negaranya.<sup>5</sup> Selain terhadap Suriah, Perancis sebelumnya juga telah melakukan intervensi kemanusiaan untuk menurunkan rezim pemerintah Qaddafi yang represif terhadap masyarakatnya salah satunya adalah di Libya dengan ikut berpartisipasi dalam operasi bersama NATO pada tahun 2011.<sup>6</sup> Sikap pro kemanusiaan Perancis juga terlihat ketika ia melakukan intervensi ke Mali di tahun 2013 yang menunjukkan manifestasinya terhadap norma r2p.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu negara barat, Perancis memiliki hubungan yang dekat dengan AS. Intervensi ke Libya ini memperlihatkan pola kerja sama Perancis yang dekat dengan negara-negara NATO terutama dengan AS. Dalam hal Suriah, Perancis juga memberikan dukungan kepada AS ketika AS ingin melakukan intervensi terkait penggunaan senjata kimia di Suriah tahun 2013. Selain itu, sebagai negara yang sama-sama menganut demokrasi, AS kini melihat Perancis

---

<sup>5</sup> "France Opposes Introduction of Migrant Quotas", *Gouvernement.Fr*, <http://www.gouvernement.fr/en/france-opposes-introduction-of-migrant-quotas> (diakses pada 19 April 2017)

<sup>6</sup> Miron Lakomy, "The Arab Spring in French Foreign Policy", *CEJISS*, 3-4 2012, 81

<sup>7</sup> BBC News, "France Confirms Mali Military Intervention", <http://www.bbc.com/news/world-africa-20991719> (diakses pada 15 April 2017)

sebagai partner militer nomor satunya di Eropa.<sup>8</sup> Anggapan AS ini bukan tidak beralasan, melainkan karena AS melihat Perancis sebagai negara yang cukup aktif dalam kebijakan luar negerinya terutama dalam menjaga stabilitas kawasan di timur tengah.

Selain berusaha untuk menurunkan pemerintahan Bashar Al-Assad, Perancis juga melakukan operasi penanggulangan terorisme. Sejak terjadinya Arab Spring dan sejak awal terjadinya krisis di Suriah, Perancis mulai melihat ISIS sebagai kelompok teroris yang perlu dilawan. Hal ini juga yang membuat penanggulangan terorisme termasuk dalam kebijakan luar negeri Perancis. Perancis merupakan anggota dari *US-Led Coalition*<sup>9</sup> yang beroperasi untuk melawan ISIS di Irak dan Suriah. Awalnya Perancis hanya melakukan operasi anti ISIS di Irak saja namun sejak September 2015, Perancis mulai menambah jangkauan operasinya tidak hanya di Irak saja tetapi juga di Suriah.<sup>10</sup>

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dua serangan terorisme di Perancis pada tahun 2015 mengubah kebijakan luar negeri Perancis di Suriah. Namun demikian serangan yang terlihat paling

---

<sup>8</sup> Agence-France Presse, "France Displaces Britain As Key US Military Ally", <http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2015/03/19/france-displaces-britain-key-us-military-ally/25025191/> (diakses pada 15 April 2017)

<sup>9</sup> 68 negara anggota US led Coalition: Mesir, Libya, Morocco, Nigeria, Somalia, Tunisia, Kanada, Panama, AS, Afganistan, Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Albania, Austria, Belgia, Boznia & Herzegovnia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Makedonia, Moldova, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, Ukraina, Inggris, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, *US department of State*, <https://www.state.gov/s/seci/c72810.htm> (diakses pada 16 April 2017)

<sup>10</sup> Kempf & Dubourcq, "The Evolution", 22

berdampak terhadap kebijakan Perancis adalah serangan di bulan November 2015. Serangan tersebut terjadi pada 13 November 2015 di Paris yang menyebabkan 130 orang meninggal dunia.<sup>11</sup> Serangan sebelumnya terjadi di kantor berita Charlie Hebdo pada 7 Januari 2015 yang menyebabkan 12 orang meninggal.<sup>12</sup> Beberapa hari setelah serangan November, ISIS memberikan klaimnya bahwa mereka yang melakukan serangan teror tersebut.

Sejak serangan teroris November 2015, ketegasan Perancis yang sebelumnya terlihat sangat kuat terhadap Assad mulai mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Perancis baik dari Presiden maupun dari Menteri Luar Negerinya. Mereka mengeluarkan pernyataan bahwa prioritas dan musuh terbesar Perancis di Suriah adalah ISIS. Hal tersebut juga dicantumkan dalam prioritas kebijakan luar negeri Perancis oleh kementerian luar negeri Perancis yaitu untuk melawan terorisme.<sup>13</sup> Bahkan dalam salah satu pernyataannya menteri luar negeri Perancis sempat menyatakan bahwa ada kemungkinan Perancis untuk bekerja sama dengan pasukan Assad dalam melawan ISIS.

Beberapa hari setelah serangan teroris November 2015, Perancis melancarkan serangan balasan kepada ISIS di Suriah. Perancis yang sebelumnya

---

<sup>11</sup> BBC News, "Paris Attacks: What Happened on The Night", <http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994> (diakses pada 16 April 2017)

<sup>12</sup> BBC News, "Charlie Hebdo Attack: Three Days of Terror", <http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237> (diakses pada 16 April 2017)

<sup>13</sup> France Diplomatie, "War in Syria: Understanding France's Position", *French Ministry of Foreign Affairs*, <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/france-and-syria/> (diakses pada 16 April 2017)

telah melakukan operasi militer melawan ISIS di Suriah, setelah serangan di Paris, kembali memaksimalkan serangannya di sana. Serangan yang dilakukan Perancis berhasil menghancurkan markas besar ISIS di Raqqa, pusat perekrutan jihad, markas persenjataan, serta pusat pelatihan teroris.<sup>14</sup> Hal ini dilakukan Perancis sebagai tindakan balas dendam karena serangan yang dilakukan ISIS di negaranya.<sup>15</sup>

Kebijakan yang dilakukan Perancis ini memperlihatkan bahwa ia sedang mengejar kepentingan nasionalnya terlebih dahulu dibandingkan dengan memberikan dukungan terhadap norma-norma internasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Perancis merupakan negara yang menjunjung tinggi norma R2p. Namun setelah serangan teroris terjadi, menjaga keamanan warga masyarakat Perancis di dalam maupun di luar negeri menjadi hal yang dinomor satukan oleh Perancis.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan perubahan kebijakan dari yang sebelumnya Perancis sangat mendukung intervensi kemanusiaan untuk menurunkan rezim tertentu, kini ia lebih berfokus kepada domestik yaitu untuk melindungi masyarakatnya.

Setelah serangan November tersebut juga, Perancis memulai pendekatannya ke negara-negara lain untuk mencari dukungan dalam melawan teroris ISIS di

---

<sup>14</sup> The Guardian, "France Launches 'Massive' Airstrike on ISIS Stronghold of Raqqa", <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/16/france-launches-massive-airstrike-on-isis-stronghold-in-syria-after-paris-attack> (diakses pada 17 April 2017)

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> France Diplomatie, "Speech by the President of the Republic before a Joint Session of Parliament (Versailles, November 16, 2015)", *French Ministry of Foreign Affairs* <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/defence-security/parisattacks-paris-terror-attacks-november-2015/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament> (diakses pada 28 April 2017)

Suriah. Keinginan untuk membuat koalisi sebesar-besarnya membuat Perancis juga melakukan pendekatan kepada Rusia.<sup>17</sup> Perancis melihat Rusia sebagai peluang yang baik untuk membangun koalisi besar anti ISIS karena Rusia pada waktu itu telah melakukan operasi di Suriah. Serangan November tersebut membuat Perancis dan Rusia kini bekerja sama dalam bidang militer dan intelijen. Mereka melakukan operasi militer bersama di Suriah dan berhasil menghancurkan salah satu markas ISIS di Suriah.<sup>18</sup>

Perubahan kebijakan selanjutnya berkaitan dengan organisasi internasional yang diikuti oleh Perancis. Apabila sebelum serangan Paris, Perancis aktif dalam operasi bersama NATO, salah satunya adalah ketika melakukan intervensi di Libya, setelah serangan November, Perancis terkesan mengesampingkan NATO.<sup>19</sup> Hal ini terlihat dari klausul yang diminta oleh Perancis. Setelah serangan November, Perancis meminta solidaritas negara-negara anggota Uni Eropa melalui klausul solidaritas Uni Eropa.<sup>20</sup> Padahal di sisi lain, NATO juga memiliki klausul solidaritas yang memiliki makna yang sama mengenai serangan terhadap satu aliansi merupakan serangan terhadap semua.<sup>21</sup> Apabila dibandingkan dengan kebijakan Perancis yang sebelumnya, ia terlihat aktif dalam

---

<sup>17</sup> Reuters, "Hollande, Putin Agree to Work More Closely to Combat Islamic State in Syria", <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-france-idUSKBN0TF1ZX20151126> (diakses pada 17 April 2017)

<sup>18</sup> Reuters "Hollande, Putin Agree"

<sup>19</sup> Kempf & Dubourcq, "The Evolution", 32

<sup>20</sup> European Parliament, Pasal 42 (7), Lisbon Treaty, *Mutual Defense Clause*, [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/sede/dv/sede200612mutualdefsolidarityclauses\\_/sede200612mutualdefsolidarityclauses\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede200612mutualdefsolidarityclauses_/sede200612mutualdefsolidarityclauses_en.pdf) (diakses pada 28 April 2017)

<sup>21</sup> NATO, article 5, *collective defense clause*, [http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_110496.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm) (diakses pada 28 April 2017)

operasi bersama NATO seperti yang dilakukannya ketika melakukan intervensi di Libya. Namun kini bagi Perancis sebagai salah satu pemain utama Uni Eropa, Perancis ingin dapat mandiri dari NATO yang banyak mendapatkan pengaruh dari AS. Karena itu ia masuk lebih jauh ke dalam kerangka kerja Uni Eropa dibandingkan NATO. Selain itu kerja samanya dengan Rusia juga menjadi pertimbangan Perancis mengapa ia tidak meminta solidaritas dari NATO.

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dari bulan Mei 2012 hingga Juli 2016 yaitu delapan bulan setelah serangan November 2015. Pada tahun tersebut dapat dilihat perubahan yang kontras dalam kebijakan Perancis di Suriah. Mei 2012 merupakan awal pemerintahan presiden Francois Hollande. Sedangkan 2016 merupakan dilaksanakannya kerjasama antara Perancis dan Rusia untuk melawan ISIS di Suriah.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Dari serangkaian penjelasan yang tertulis di latar belakang dan identifikasi masalah dapat diketahui bahwa masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai perubahan kebijakan luar negeri Perancis. Dengan demikian pertanyaan penelitian yang diajukan penulis adalah :

*Bagaimana parameter domestik dan internasional mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Perancis terhadap Suriah pasca Paris attack?*

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan umum membahas kebijakan luar negeri Perancis, secara khususnya untuk:

- Mengetahui perubahan kebijakan luar negeri Perancis
- Mengetahui kebijakan luar negeri Perancis di Suriah
- Melihat proses pembuatan kebijakan luar negeri Perancis
- Mengetahui parameter domestik dan internasional penentu kebijakan luar negeri Perancis

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini secara umum memiliki kegunaan untuk menjadi bahan pengetahuan tambahan bagi pembaca secara khususnya untuk:

- Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
- Sebagai syarat kelulusan S1 Universitas Parahyangan Bandung
- Menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis mengenai kebijakan luar negeri Perancis di Suriah
- Memberi pemahaman umum kebijakan Perancis kepada pembaca

### **1.4. Kajian Literatur**

Bagian ini akan memperlihatkan perdebatan para akademisi mengenai kebijakan luar negeri Perancis di Suriah. Dalam melihat politik luar negeri Perancis di Timur Tengah dan secara spesifik di Suriah, terdapat beberapa kelompok besar akademisi yang penelitiannya dipakai oleh peneliti sebagai

acuan dan untuk memposisikan penelitiannya. Kelompok pertama adalah kelompok yang menilai bahwa kebijakan luar negeri Perancis ini lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan dalam konteks internasional. Menurut Oliver Kempf dan Jean Dufourcq, Perancis memiliki peranan yang spesial di Suriah karena Suriah merupakan negara bekas jajahan Perancis. Di awal masa pemerintahan Presiden Hollande, ia mengadopsi kebijakan yang tegas terhadap Suriah. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah niatan untuk intervensi terhadap rezim Assad pada tahun 2013. Namun kemudian Perancis mengalami isolasi internasional karena kebijakannya yang dianggap terlalu tegas.<sup>22</sup> Ketika Perancis mulai menanggapi sistem internasional tersebut dengan menurunkan ketegasannya terhadap Assad, ia mulai mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Termasuk juga dukungan yang diberikan negara-negara barat setelah Perancis mengalami serangan teroris.

Berbeda dengan Kempf dan Dufourcq, yang berpendapat bahwa kebijakan Perancis disebabkan oleh parameter internasional, Gaffney menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Perancis lebih dipengaruhi oleh parameter domestik. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul *Political Leadership and The Politics of Performance*, menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Francois Hollande dalam menanggapi penggunaan senjata kimia di Suriah pada tahun 2013 didorong oleh faktor domestik yaitu untuk menaikkan *rating*

---

<sup>22</sup> Lihat Jean Dufourcq & Oliver Kempf, "The Evolution of France's Policy in Syria", *Dirasat* (King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 2016),41

kepresidenannya yang rendah.<sup>23</sup> Hollande dianggap tidak berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat Perancis yang menyebabkan ratingnya menjadi sangat rendah. Inisiatif untuk intervensi ke Suriah pada tahun 2013 diharapkan oleh Hollande dapat mengubah pandangan masyarakat Perancis namun sebaliknya keinginan tersebut tidak tercapai.

Di sisi lain, Frederic Bozo mengemukakan pandangan yang berbeda dari kedua akademisi tadi mengenai kebijakan luar negeri Perancis. Dengan analisa yang lebih luas, Ia menganalisa kebijakan luar negeri Perancis sejak tahun 1945. Menurutnya Perancis memiliki prioritas untuk menjadikan dunia internasional tidak lagi unipolar (dengan hegemoni AS) tetapi dengan adanya Uni Eropa, Perancis berusaha membuat dunia internasional menjadi multipolar.<sup>24</sup> Hal ini yang membentuk kebijakan luar negerinya selama ini. Karena itu kebijakan luar negeri Perancis banyak berfokus kepada penguatan integrasi Uni Eropa dan untuk mengejar kepentingan nasionalnya sebagai negara *middle power*. Perannya di Suriah juga merupakan realisasi Perancis dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sama degan Bozo, Alassane Dembele juga mengungkapkan bahwa sejak perang dunia II, Perancis memaksimalkan usahanya untuk menjadi pemain besar dalam dunia internasional.<sup>25</sup> Karena itu dalam hal kebijakan luar negerinya

---

<sup>23</sup> Lihat John Gaffney, "Political Leadership and The Politics of Performance: France, Syria, and the Chemical Weapons Crisis of 2013", *French Politics* (London: Palgrave Macmillan, 2014), 218

<sup>24</sup> Lihat Frederic Bozo, *French Foreign Policy since 1945: An Introduction*, (Paris: Berghan Books, 2016),

<sup>25</sup> Lihat Alassane Dembele, "The French Intervention in Syria", *Perspective on Global Issues*, Spring 2016, 38

terhadap Suriah, Dembele berpendapat bahwa Perancis mengejar ambisi internasional yang berdasar pada kepentingan nasionalnya di Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari intervensinya di Suriah mulai dari 2013 hingga operasi anti ISIS di Suriah pada 2015.

Dapat dilihat bahwa kebijakan Perancis terhadap Suriah ini masih mengalami banyak perdebatan diantara para akademisi. Hal ini lah yang membuat penelitian ini layak untuk dilaksanakan. Menanggapi hal tersebut, posisi penulis dalam perdebatan ini yaitu melihat bahwa ada dua parameter yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Perancis, domestik serta internasional. Namun dalam kasus Suriah, parameter dominan yang membentuk kebijakan luar negeri Perancis adalah parameter domestik. Hal ini melengkapi penelitian yang dikemukakan oleh Gaffney. Namun penulis melihat ada indikator lain selain Presiden, yang membentuk kebijakan luar negeri. Penulis mengidentifikasi beberapa acuan indikator domestik berdasarkan teori di antaranya adalah opini publik, parlemen, presiden, serta media massa yang kemudian menjadi penekan terhadap pengambil keputusan untuk mengubah kebijakannya terhadap Suriah.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian hubungan eksternal yang resmi yang dilakukan oleh aktor-aktor independen (biasanya negara) dalam hubungan internasional.<sup>26</sup> Argumen yang dibangun oleh Hill adalah bahwa kebijakan luar

---

<sup>26</sup> Lihat Christopher Hill, *Foreign policy in international relations "Foreign Policy in the twenty first century"*, (London: Palgrave Macmillan, 2016), 4

negeri suatu negara dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di domestik dan internasional.

Kebijakan luar negeri dilakukan dalam konteks internasional antara aktor-aktor independen. Karena itu terdapat hubungan yang kuat antara domestik dan internasional dilihat dari lokasi ia dilakukan dan penyebab ia dilakukan. Domestik dan internasional dapat diartikan sebagai dua ujung yang berbeda dari sebuah kontinum yang juga tidak dapat dipahami tanpa pengertian yang menyeluruh mengenai domestik suatu negara.<sup>27</sup> Dapat diartikan bahwa sejumlah kejadian yang terjadi di dalam sebuah negara akan menjadi pertimbangan negara untuk menyusun kebijakan luar negerinya. Selain itu terdapat juga konteks internasional yang mendorong dilakukan atau tidaknya sebuah kebijakan luar negeri. Dengan demikian argumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah politik luar negeri dipengaruhi oleh keadaan domestik dan juga situasi internasional dimana ia dilaksanakan.

Christopher Hill menjelaskan bahwa aktor yang paling berperan dalam kebijakan luar negeri adalah kepala eksekutif suatu negara yaitu Presiden. Di Perancis, pengambil keputusan tertinggi dibagi menjadi dua yaitu Presiden dan Perdana menteri. Keduanya sama-sama menjalankan fungsi eksekutif. Namun, dalam konstitusi Perancis saat ini yaitu konstitusi republik kelima, diatur bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang lebih untuk melakukan kebijakan luar negeri.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.,44

<sup>28</sup> Lihat Andrew Knapp & Vincent Wright, *The Government and Politics of France*, (London: Routledge, 2006), 87

Dalam menganalisa kebijakan luar negeri Perancis terhadap Suriah, penulis meminjam pemikiran dari Christopher Hill mengenai parameter domestik dan internasional dalam melihat kebijakan luar negeri. Parameter domestik yang dimaksud terdiri dari beberapa indikator yaitu opini publik, parlemen, presiden, dan media. Sedangkan parameter internasional yang dimaksud dilihat dari dua indikator yaitu politik geografi dan interdependensi politik.<sup>29</sup> Beberapa parameter domestik tadi digunakan sebagai alasan negara untuk mengelak apabila terdapat tuntutan dari dunia internasional. Frase “tangan saya terikat”, sering dipergunakan negara dengan melihat bahwa terdapat tuntutan-tuntutan dari domestik sehingga ia harus melakukan suatu kebijakan luar negeri atau mengabaikan tekanan dari internasional.

Sesuai dengan pemikiran Hill, opini publik termasuk dalam salah satu parameter domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dalam negara demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tentunya menjadi pijakan mengapa suara publik sangat penting dalam suatu negara. Dalam penyusunan kebijakan luar negeri, publik berperan sebagai pengikut bukan sebagai eksekutor utama kebijakan luar negeri.<sup>30</sup> Meskipun demikian, publik tetap memiliki peran penting. Hal ini disebabkan karena dalam negara demokrasi, publik memiliki hak untuk menyampaikan opininya dengan bebas. Opini tersebut dapat menjadi

---

<sup>29</sup> Lihat Christopher Hill, *Foreign policy in international relations* “Foreign Policy in the twenty first century”, (London: Palgrave Macmillan, 2016) Parameter domestik antara lain: opini publik, presiden, parlemen, konstitusi, rezim, pers, dan kelompok kepentingan, namun untuk keperluan penelitian, hanya digunakan opini, parlemen, pers, dan presiden

<sup>30</sup> Ibid.,272

tekanan tersendiri bagi pemerintah sehingga pemerintah harus mendengarkan tuntutan dari masyarakat. Cara untuk mengetahui opini publik adalah melalui aspirasi masyarakat dari berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga survey serta penyampaian aspirasi langsung seperti demonstrasi massa.

Parameter domestik selanjutnya yang menjadi penentu politik luar negeri yaitu Presiden. Presiden termasuk eksekutor utama kebijakan luar negeri. Meskipun presiden memiliki menteri luar negeri yang juga bertanggung jawab dalam kebijakan luar negeri, namun sebagian besar waktu yang dimiliki presiden dihabiskan untuk mengurus kebijakan luar negeri.<sup>31</sup> Dengan kata lain, kekuasaan tertinggi dalam hal kebijakan tetap dipegang oleh presiden sehingga pengaruhnya dalam kebijakan luar negeri sangat besar. Presiden termasuk dalam parameter domestik karena ia dipilih oleh masyarakat suatu negara sebagai kepala yang bertugas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, dalam negara demokrasi, keberpihakan masyarakat kepada presiden juga menjadi hal yang penting karena apabila masyarakat menyenangi presidennya, maka presiden akan mendapat dukungan dari publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Untuk mengetahui bagaimana presiden ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri dapat dilihat dari latar belakang presiden, pembawaannya, cara berpenampilannya, afiliasi politiknya, serta melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid.,59-60

<sup>32</sup> Lihat John Gaffney, "Political Leadership and The politics of performance: France, Syria, and the chemical weapons crisis of 2013", *French Politics*, Vol.12 No.3, 219

Parlemen, sebagai wakil rakyat di pemerintahan juga berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Parlemen merupakan simbol kontrol politik dan juga sebagai pengkritik kebijakan-kebijakan Presiden.<sup>33</sup> Di beberapa negara, kebijakan presiden sangat tergantung pada seberapa banyak anggota dari partainya yang duduk di parlemen. Apabila partai yang bukan partai asal Presiden menduduki sebagian besar kursi di parlemen, kemungkinan besar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden akan memperoleh banyak kritikan bahkan penolakan dari partai oposisi di parlemen tersebut sehingga terkadang memberi tekanan tersendiri kepada presiden. Hal tersebut menunjukkan bahwa suara parlemen berpengaruh terhadap jalannya sebuah kebijakan. Partai-partai yang berkuasa dalam suatu negara serta pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya atau tindakan yang diambilnya dapat menjadi indikator untuk melihat bagaimana parlemen mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan luar negeri.

Indikator berikut dan juga yang merupakan indikator terakhir dalam menganalisa parameter domestik politik luar negeri adalah media massa atau pers. Dalam era informasi yang serba cepat, media menjadi mata yang mengawasi pemerintahan dan juga yang dapat membentuk opini publik.<sup>34</sup> Selain berperan membentuk opini publik media juga memiliki peran terhadap para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan melihat pemberitaan mengenai negara lain melalui media massa dan juga mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di negaranya melalui media. Cara media mempengaruhi

---

<sup>33</sup> Hill, *Foreign policy*, 262

<sup>34</sup> *Ibid.*, 282

kebijakan luar negeri yaitu melalui tulisan-tulisan di media cetak atau wawancara melalui media elektronik. Melalui tulisan-tulisan di koran, media ikut memberikan tekanan kepada para pengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Semakin banyak pemberitaan yang dilakukan suatu media terkait isu tertentu berarti semakin besar tekanan yang diberikan oleh media terhadap pemerintah dalam isu tersebut.

Setelah berbicara mengenai parameter domestik yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, yang tidak kalah pentingnya juga adalah kondisi internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut. Internasional merupakan tempat dimana politik luar negeri itu dilaksanakan. Hill memulai penjelasannya dengan memaparkan bahwa negara berada dalam suatu dimensi internasional yang anarki.<sup>35</sup> Negara-negara akan memilih apakah akan saling berkonflik atau bekerja sama dalam anarki. Christopher Hill kemudian memaparkan dua garis besar mengenai dimensi internasional yaitu politik geografi serta interdependensi politik.<sup>36</sup>

Politik geografi berbicara mengenai kondisi geografis suatu negara. Mulai dari apa yang terkandung dalam negara tersebut seperti sumber daya alam, potensi yang dimiliki masyarakat, batas-batas negara, serta identitas masyarakat suatu negara.<sup>37</sup> Dalam bab 3 penulis akan berbicara mengenai identitas masyarakat serta kedekatan geografis negara yang kemudian membuat kebijakan

---

<sup>35</sup> Ibid.,169

<sup>36</sup> Ibid., 176-192

<sup>37</sup> Ibid., 176

luar negeri dijalankan. Identitas yang sama dan kedekatan geografis suatu negara dengan negara lain membuat hubungan antar negara menjadi lebih dekat termasuk dalam kebijakan luar negeri.

Di samping itu, interdependensi politik juga sesuatu yang harus diperhatikan dalam situasi internasional yang anarki. Hill menjelaskan bahwa ada beberapa sumber dari interdependensi politik diantaranya adalah organisasi internasional, hukum internasional, norma-norma informal, serta hirarki negara.<sup>38</sup> Hukum internasional dan norma-norma informal merupakan dua hal yang terdapat dalam organisasi internasional. Keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional akan diikuti oleh peraturan-peraturan serta norma-norma agar hubungan antarnegara berjalan dengan baik. Sedangkan hirarki negara yang dimaksud di sini adalah posisi suatu negara dalam organisasi internasional. Negara dapat menjadi aktor yang memiliki peran besar dalam organisasi internasional dan dapat juga menjadi aktor biasa-biasa saja atau yang tidak terlalu memiliki pengaruh dalam organisasi internasional. Negara dapat saja menjadi bagian dari beberapa organisasi internasional sekaligus namun negara akan memilih organisasi di mana ia dapat berperan signifikan agar kepentingannya dapat tercapai.<sup>39</sup>

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penulisan kali ini kerangka pemikiran diisi dengan teori kebijakan luar negeri dari Christopher Hill. Teori ini menjelaskan bahwa politik luar negeri dipengaruhi oleh parameter domestik dan

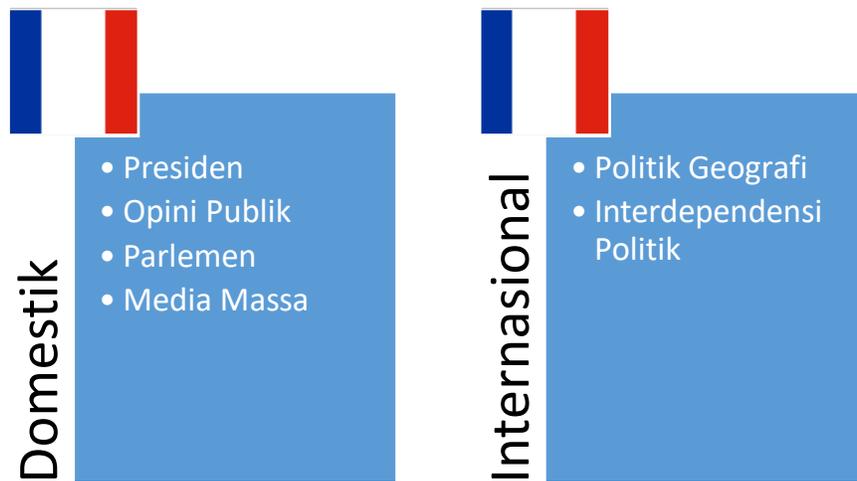
---

<sup>38</sup> Ibid., 183

<sup>39</sup> Ibid., 191

internasional. Parameter domestik diantaranya opini publik, presiden, parlemen serta pers. Sedangkan parameter internasional yaitu politik geografi dan interdependensi politik. Interdependensi politik bersumber dari organisasi internasional, hukum internasional, norma internasional serta hirarki negara.

**Gambar 1.5**  
**Parameter kebijakan luar negeri**



## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explaining case. Dalam explaining case, penelitian yang dilakukan bukan untuk pengetesan teori, namun menjelaskan sebuah kasus dengan mempergunakan teori, dimana data-data dan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses penelitian didasarkan kepada teori tertentu terkait dengan validitas dari teori tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Lihat Stephen Van Evera, *Guide to Methods for Students of Political Science*, (London: Cornell University Press, 1997), 75

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan analisa data sekunder. Analisa data sekunder merupakan analisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti peneliti sebelumnya dan analisa statistik resmi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu.<sup>41</sup> Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi baik dari pemerintah maupun organisasi internasional, website, report juga dari media-media online. Sedangkan data statistik resmi diperoleh dari lembaga-lembaga resmi yang mengadakan survey tertentu serta dari surat kabar online. Dengan melakukan analisa data sekunder penelitian dapat berlangsung lebih hemat waktu serta validasi data yang digunakan lebih berkualitas karena telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan profesional.<sup>42</sup>

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

**Bab I**, Pendahuluan, bagian ini membahas latar belakang masalah mengenai kebijakan Perancis di Suriah, identifikasi masalah yaitu perubahan kebijakan luar negeri Perancis di Suriah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Setelah itu dijelaskan juga literatur acuan sebanyak empat literatur serta teori yang dipakai yaitu teori determinan domestik dan internasional dari Christopher Hill. Selain itu terdapat juga tujuan dan kegunaan penelitian serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.

---

<sup>41</sup> Lihat Alan Bryman, *Social Research methods 4<sup>th</sup> Edition*, (New York: Oxford University Press Inc, 2012), 312

<sup>42</sup> Ibid.

**Bab II**, Perubahan kebijakan luar negeri Perancis di Suriah, bagian ini membahas tiga perubahan kebijakan Perancis di Suriah

**Bab III**, Parameter yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Perancis di Suriah, bagian ini menjelaskan beberapa alasan perubahan kebijakan sesuai teori dari Christopher Hill

**Bab IV**, memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini